

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBD)  
DESA KANDANGREJO  
TAHUN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KEDUNGPRING  
DESA KANDANGREJO



**KECAMATAN KEDUNGPRING  
PEMERINTAH DESA KANDANGREJO**

PERATURAN DESA **KANDANGREJO** KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **KANDANGREJO**  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA KANDANGREJO**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
33. Peraturan Desa **KANDANGREJO** Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA KANDANGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGREJO TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangrejo Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.848.654.000 (*Delapan ratus Empatpuluh Delapan Juta Enam Ratus Limapuluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 848.654.000,- |
| b. Belanja        |                   |
| 1) Langsung       | Rp. 586.754.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 261.900.000,- |
| c. Pembiayaan     |                   |
| 1) Penerimaan     | Rp. 0,-           |
| 2) Pengeluaran    | Rp 0,-            |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kandangrejo  
Pada tanggal : 18 Februari 2013

**KEPALA DESA KANDANGREJO**

ttd

**MOCH. CHOIRUL HUDA**



Lampiran Peraturan Desa Kandangrejo  
 Kec. Kedungpring Kab. Lamongan  
 Nomor : 01 Tahun 2013  
 Tanggal : Pebruari 2013  
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
 (APBD ) Desa Kandangrejo

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA KANDANGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING  
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	4	5	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>390,804,000</b>	<b>848,654,000</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>146,604,000</b>	<b>152,904,000</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>6,500,000</b>	<b>6,500,000</b>	
1.1.1.1	BUMDES	-		
1.1.1.2	USAHA KSU/SIMPAN PINJAM DESA	3,000,000	3,000,000	
1.1.1.3	USAHA JASA/PELAYANAN DESA	2,500,000	2,500,000	
1.1.1.4	BADAN/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG DIKELOLA DE	1,000,000	1,000,000	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>	<b>64,500,000</b>	<b>69,500,000</b>	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)	12,500,000	2,500,000	
1.1.2.1.1	TANAH DESA (sewa tanah/suguh/dayuh/pager kikis dll)	2,500,000	2,500,000	
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK (Kades/Perangkat desa lainnya dll)	44,500,000	44,500,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS		14,000,000	
1.1.2.1.4	Hasil penghijauan jalan desa	2,000,000	3,000,000	
1.1.2.1.5	hasil sewa molen	3,000,000	3,000,000	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>38,104,000</b>	<b>39,104,000</b>	
1.1.3.1	SWADAYA MASYARAKAT	25,000,000	26,000,000	
1.1.3.2	PARTISIPASI KELOMPOK MASYARAKAT (HIPPA)	13,104,000	13,104,000	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>30,000,000</b>	<b>32,000,000</b>	
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG-ROYONG	30,000,000	32,000,000	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	<b>7,500,004</b>	<b>5,800,000</b>	
1.1.5.1	JASA SURAT-MENYURAT	3,000,000	3,500,000	
1.1.5.2	PROSENTASE JASA PELAYANAN DESA	2,500,000	300,000	
1.1.5.3	JASA PUNGUT DESA (jual beli ternak, peralatan dll)	2,000,000	2,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	4	5	6
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak :</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA			
1.2.2	BAGI HASIL PBB	5,000,000	5,000,000	
1.2.3				
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll)	-	-	
<b>1.4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>	<b>58,000,000</b>	<b>93,000,000</b>	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	16,500,000	16,500,000	
	Pembangunan Jalan Lingkungan		35000000	
<b>1.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya</b>	<b>181,200,000</b>	<b>237,750,000</b>	
<b>1.5.1</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah</b>	-	-	
1.5.1.1	PEMBANGUNAN JALAN POROS	-	-	
1.5.1.2	LEMBAGA nGO	-	-	
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA	-	-	
<b>1.5.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>	<b>110,000,000</b>	<b>140,000,000</b>	
1.5.2.1	BANTUAN KEUANGAN DESA	90,000,000	-	
1.5.2.2	PNPM	-	120,000,000	
1.5.2.3	USAHA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN	20,000,000	20,000,000	
<b>1.5.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>	<b>68,800,000</b>	<b>95,350,000</b>	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	62,400,000	10,800,000	
	TPAPD Perangkat Desa		62,400,000	
1.5.3.2	TPBPD	4,400,000	5,650,000	
1.5.3.3	OPERASIONAL RT/RW		4,000,000	
1.5.3.4	ASURANSI KEPALA DESA	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.5	BANTUAN PURNA BAKHTI	-	5,000,000	
1.5.3.6	KOMPENSASI SEKDES	-	-	
1.5.3.7	Bantuan Program E-KTP	1,000,000		
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	4	5	6
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	2,400,000	2,400,000	
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	2,400,000	2,400,000	
1.6	Hibah	-	320,000,000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah Pusat	-	-	
1.6.1.1				
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	320,000,000	
1.6.2.1	Pembangunan Lumbung Desa dan Penjemuran	30,000,000	-	
1.6.2.2	Pengadaan alat pertanian		250,000,000	
1.6.2.3	Pengadaan penghijauan		70,000,000	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.3.1				
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	40,000,000	
1.7.1	Sumbangan Pemilihan Kepala Desa	-	40,000,000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	<b>390,804,000</b>	<b>848,654,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	4	5	6
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>390,804,000</b>	<b>848,654,000</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>194,254,000</b>	<b>586,754,000</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>	<b>24,284,000</b>	<b>24,284,000</b>	
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUT/JASA DESA	5,000,000	5,000,000	
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA	-	-	
2.1.1.3	HONORARIUM PETUGAS K3L DESA	-	-	
2.1.1.4	HONORARIUM KETUA RT/RW	1,000,000	1,000,000	
2.1.1.5	HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	500,000	500,000	
2.1.1.6	HONORARIUM PENGURUS LPM	1,080,000	1,080,000	
2.1.1.7	HONORARIUM KPTD	600,000	600,000	
2.1.1.8	HONORARIUM TIM/ PANITIA DESA	3,000,000	3,000,000	
2.1.1.9	HONORARIUM PENGURUS HIPPA	13,104,000	13,104,000	
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>169,970,000</b>	<b>562,470,000</b>	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	<b>6,470,000</b>	<b>6,470,000</b>	
2.1.2.1.1	KEPALA DESA/PERANGKAT DESA LAINNYA	900,000	900,000	
2.1.2.1.2	PENGURUS BPD	990,000	990,000	
2.1.2.1.3	PENGURUS LPMD	1,080,000	1,080,000	
2.1.2.1.4	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	500,000	500,000	
2.1.2.1.5	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	3,000,000	3,000,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	<b>163,500,000</b>	<b>556,000,000</b>	
2.1.2.2.1	BELANJA ATK	3,500,000	3,500,000	
2.1.2.2.2	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	3,500,000	4,000,000	
2.1.2.2.3	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	2,500,000	5,000,000	
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	3,500,000	3,500,000	
2.1.2.2.5	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	27,000,000	27,000,000	
2.1.2.2.7	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	15,000,000	16,500,000	
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN/MATERIAL (PNPM)	-	120,000,000	
2.1.2.2.9	PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN	20,000,000	20,000,000	
2.1.2.2.10	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN LINGK	87,000,000	35,000,000	
2.1.2.2.11	BELANJA BAHAN/MATERIAL LUMBUNG DESA	-	-	
2.1.2.2.12	BELANJA BIBIT PENGHIJAUAN		70,000,000	
2.1.2.2.13	BELANJA ALAT PERTANIAN		250,000,000	
2.1.2.2.14				

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	4	5	6
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>			
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH			
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)			
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b> (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	<b>196,550,000</b>	<b>261,900,000</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap</b>	<b>114,500,000</b>	<b>131,550,000</b>	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades			
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	15,000,000	15,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	9,600,000	10,800,000	
2.2.1.1.3	ASURANSI KEPALA DESA	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.1.4	BANTUAN PURNA BHAKTI KEPALA DESA		5,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKDES NON PNS	2,500,000	2,500,000	
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES NON PNS			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun			
2.2.1.3.1	<b>Belanja Kasun Kandangrejo</b>			
2.2.1.3.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	5,000,000	5,000,000	
2.2.1.3.1.2	TPAPD KEPALA DUSUN	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.3.2.	<b>Belanja Kasun Kedung</b>			
2.2.1.3.2.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	5,000,000	5,000,000	
2.2.1.3.2.2	TPAPD KEPALA DUSUN	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.3.3.	<b>Belanja Kasun Kandangan</b>			
2.2.1.3.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	5,000,000	5,000,000	
2.2.1.3.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur			
2.2.1.4.1	<b>Belanja Kaur Umum</b>			
2.2.1.4.1.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	2,500,000	2,500,000	
2.2.1.4.1.2	TPAPD KASI/KAUR	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.4.2	<b>Belanja Kaur Keuangan</b>			
2.2.1.4.2.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	2,500,000	2,500,000	
2.2.1.4.2.2	TPAPD KASI/KAUR	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.4.3	<b>Belanja Kasi Pemerintahan</b>			
2.2.1.4.3.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	2,500,000	2,500,000	
2.2.1.4.3.2	TPAPD KASI/KAUR	6,600,000	7,800,000	

1	2	4	5	6
2.2.1.4.4	<b>Belanja Kasi Ekbang</b>			
2.2.1.4.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	2,500,000	2,500,000	
2.2.1.4.4.2	TPAPD KASI/KAUR	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.4.5	<b>Belanja Kasi Kesmasy.</b>			
2.2.1.4.5.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	2,000,000	2,000,000	
2.2.1.4.5.2	TPAPD KASI/KAUR	6,600,000	7,800,000	
2.2.1.5	<b>Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD</b>			
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD	2,200,000	2,200,000	
2.2.1.5.2	TUNJANGAN BPD	4,400,000	5,650,000	
2.2.2	<b>Belanja Hibah</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	USAHA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN	20,000,000	20,000,000	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)			
2.2.3	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>29,000,000</b>	<b>29,000,000</b>	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	2,500,000	2,500,000	
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA	26,000,000	26,000,000	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA	-	-	
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP	500,000	500,000	
2.2.4	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>30,604,000</b>	<b>79,104,000</b>	
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	6,000,000	6,000,000	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK	1,500,000	1,500,000	
2.2.4.6	OPERASIONAL POS YANDU	500,000	500,000	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW	2,000,000	4,000,000	
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS	500,000	500,000	
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN/HIPPA	13,104,000	13,104,000	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	4	5	
2.2.4.10	OPERASIONAL PROGRAM E-KTP	1,000,000	-	
2.2.4.11	OPERASIONAL PEMILIHAN KEPALA DESA		46,500,000	
2.2.4.12	ASURANSI KEPALA DESA		1,000,000	
2.2.4.13				
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja tak terduga</b>	<b>2,446,000</b>	<b>2,246,000</b>	
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT	2,446,000	2,246,000	
2.2.5.2	BENCANA ALAM			
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>390,804,000</b>	<b>848,654,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	4	5	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	-		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-		
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-		
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>	<b>-</b>		

Ditetapkan di : Kandangrejo  
 Pada tanggal : Pebruari 2013

**KEPALA DESA KANDANGREJO**

ttd

**MOCH. CHOIRUL HUDA**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA KANDANGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGREJO KECAMATAN  
KEDUNGPRING NOMOR : 188/.../413312.07.1/2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KANDANGREJO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGREJO  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGREJO**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa KANDANGREJO tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KANDANGREJO Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa . KANDANGREJO Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa KANDANGREJO membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KANDANGREJO tahun anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGREJO TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

**Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangrejo Tahun Anggaran 2013.**

**Pasal 2**

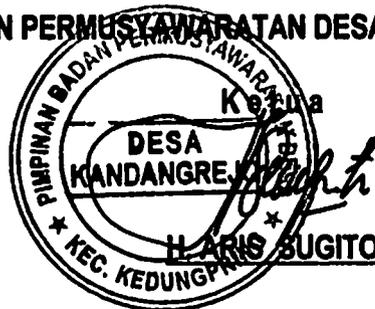
**Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.**

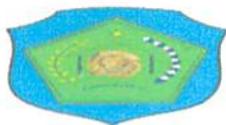
**Pasal 3**

**Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di : Kandangrejo  
Pada tanggal : 18 Pebruari 2013**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGREJO**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA KANDANGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KANDANGREJO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANGREJO  
KECAMATAN KEDUNGPRING  
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / ..ol. / 413.312.07.1 / 2013

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapanbelas, bulan Pebruari, Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kandangrejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangrejo Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Kandangrejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kandangrejo menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangrejo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangrejo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kandangrejo

Tanda-tangan

1. H. ARIS SUGITO  
Ketua
2. SUMARSONO  
Anggota
3. SUNARDI  
Anggota
4. KHOIRUL ANAM  
Anggota
5. ASMAI KOCO K  
Anggota
6. EDI PRISTIONO  
Anggota

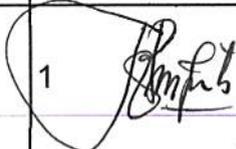
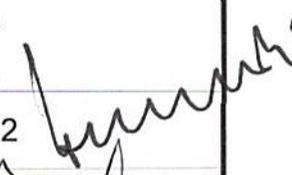
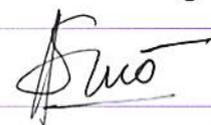
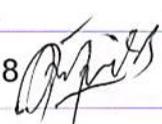
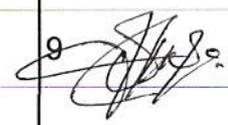
<ol style="list-style-type: none"> <li>7. <u>ARIS SUNARKO</u> Anggota</li> <li>8. <u>M. HUDA</u> Anggota</li> <li>9. <u>KASIANI</u> Anggota</li> <li>10. <u>SUDARSONO</u> Anggota</li> <li>11. <u>TASWI</u> Anggota</li> </ol>	
--	--

## DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Pebruari 2013

Acara : Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan APBDesa Tahun 2013

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ARIS SUGITO	Ketua	1 
2	SUNARDI	Anggota	2 
3	SUMARSONO	Anggota	3 
4	ARIS SUNARKO	Anggota	4 
5	EDI PRISTIONO	Anggota	5 
6	KHOIRUL ANAM	Anggota	6 
7	ASMAI KOCO K	Anggota	7 
8	M. MAHFUDH	Anggota	8 
9	KASIARI	Anggota	9 
10	SUDARSONO	Anggota	10 
11	TASUWI	Anggota	11 

KETUA BPD



  
H. ARIS SUGITO